

**PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK
SEBAGAI PEMEGANG GADAI ATAS OBYEK JAMINAN YANG
TELAH TERIKAT JAMINAN FIDUSIA DI PT. BPR
PUSPA KENCANA WONOSOBO**

INTISARI

Shafrinda Rolistria Mekarisma¹, dan Ninik Darmini²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis keabsahan pembebanan jaminan gadai yang obyeknya telah terikat jaminan fidusia dan perlindungan hukum pihak ketiga yang beritikad baik sebagai pemegang gadai atas obyek jaminan yang telah terikat jaminan fidusia di PT. BPR Puspa Kencana Wonosobo.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris, yaitu penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan 2 data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan. Bahan hukum primer meliputi undang-undang dan peraturan-peraturan hukum lainnya, sedangkan data sekunder diperoleh dari kepustakaan. Bahan hukum sekunder meliputi buku dan jurnal.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa keabsahan pembebanan jaminan gadai yang obyeknya telah terikat jaminan fidusia adalah tidak sah, karena kesesuaian Pasal 1320 KUHPdata salah satu syarat objektifnya yaitu kausa yang halal telah dilanggar. Hal tersebut bertentangan dengan undang-undang yaitu Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan pemberi fidusia dilarang mengalihkan obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dengan penerima fidusia. Suatu perlindungan hukum kepada Pihak ketiga, secara yuridis belum ada perlindungan hukum yang optimal, dikarenakan pada dasarnya semua memahami atas aturan jaminan fidusia dan gadai tersebut. Pihak ketiga menanggung risiko yang dialaminya, serta akibat hukumnya bagi pihak ketiga dari pemberian gadai atas benda yang telah dijadikan jaminan fidusia belum adanya perlindungan hukum yang pasti bagi penerima gadai untuk mengambil pemenuhan atas jaminan tersebut meskipun obyek tersebut telah di eksekusi terhadap debitur yang wanprestasi.

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Gadai, Perlindungan Hukum.

¹ Condong Catur, Depok, Kabupaten Sleman

² Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

**PROTECTION OF THIRD PARTY LAWS AS GOOD AS A COLLAPSHIP
FOR THE WARRANTY OBJECT HAS BEEN BOUNDED
FIDUCIARY GUARANTEE IN PT. BPR PUSPA
KENCANA WONOSOBO**

ABSTRACT

Shafrinda Rolistria Mekarisma³, and Ninik Darmini⁴

This study aims to examine and analyze how the validity of the loading of mortgage guarantees whose objects have been bound fiduciary guarantees and how the protection of third-party law is well-intentioned as a holder of the security object that has been bound by fiduciary guarantee in PT. BPR Puspa Kencana Wonosobo.

This research is a normative-empirical research, that namely is the research that starts from the problem by looking at the existing in the field, that connect it with the prevailing laws and regulations. This study uses 2 data, namely primary data and secondary data. Primary data is obtained from the field. Primary legal materials include laws and other legal regulations, while secondary data is obtained from literature. Secondary legal materials include books and journals.

Based on the results of the research and discussion, it is known that validity of the collateral for which the object has been bound by fiduciary is invalid, because the suitability of article 1320 of the Civil Code is one of the objective condition. This is contrary of the law, namely Article 23 paragraph (2) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee, which states that fiduciary is prohibited from transferring fiduciary objects without written approval with the fiduciary recipient. A legal protection of third parties, judicially there is no legal protection, because basically all understand the rules of fiduciary collateral and mortgage. The third party bears the risk it experiences, as well as the legal consequences for the third party from pledging the object that has been used as a fiduciary guarantee that there is no definite legal protection for the pledge recipient to take fulfillment of the guarantee even though the object has been executed against the defaulted debtor.

Keywords : Fiducia Guarantee, Pawning, Legal Protection.

³ Condong Catur, Depok, Kabupaten Sleman

⁴ Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta